



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 80 TAHUN 2018

TENTANG

PETA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SERTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan peta jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jabatan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, SERTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan kerja organisasi.
7. Analisis Jabatan adalah suatu proses, metode atau teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
8. Identitas Jabatan adalah identitas yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.

9. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah jabatan.
10. Kode Jabatan adalah kode merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisir jabatan.
11. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
12. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
14. Perangkat kerja adalah mesin, perkakas, peralatan kerja dan alat kerja lainnya.
15. Tanggung jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-seginya.
16. Syarat jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
17. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peta jabatan menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan analisis beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III PETA JABATAN

Pasal 3

- (1) Peta jabatan dibuat sesuai dengan struktur organisasi dari setiap unit kerja.
- (2) Peta jabatan terdiri atas susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
- (3) Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukan dalam unit organisasi serta memuat jumlah pegawai, pangkat/golongan ruang, kualifikasi pendidikan, dan beban kerja unit organisasi.
- (4) Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018 NOMOR 80

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 80 Tahun 2018

Tanggal : 9 Agustus 2018

Tentang : Peta Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Muba

**PETA JABATAN BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI				
IV/e :	-			
IV/d :	-	III/d : 1	II/d : -	I/d : -
IV/c :	-	III/c : 2	II/c : -	I/c : -
IV/b :	1	III/b : 5	II/b : -	I/b : -
IV/a :	-	III/a : 2	II/a : -	I/a : -

11 ORANG TERDIRI DARI			
Es.I :	-	Es.III : 1	JFT : -
Es.II :	-	Es.IV : 3	JFU : 7

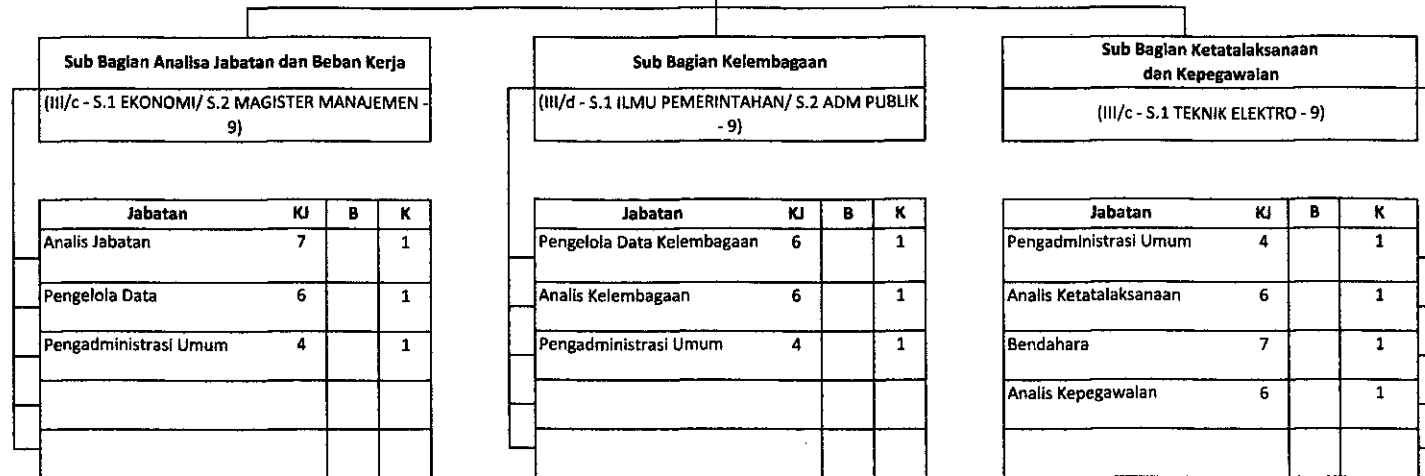
SEKRETARIS DAERAH
(IV/c - S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
(IV/b - S.1 ILMU SOSIAL/ S.2 ADM PUBLIK- 12)

BAGIAN ORGANISASI
(IV/b - S.1 ILMU SOSIAL/ S-2 MAGISTER PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH - 11)

BEBAN KERJA
Memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan bidang analisis jabatan, analisis beban kerja, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi.

Keterangan :	
- Jumlah JFU/Staf saat ini	: 7 orang
- Kebutuhan JFU/Staf berdasar ABK	: 10 orang



**PETA JABATAN BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : 1	II/d : 1	I/d : -
IV/c : -	III/c : 1	II/c : 1	I/c : -
IV/b : 1	III/b : 5	II/b : 1	I/b : -
IV/a : 1	III/a : -	II/a : -	I/a : -

12 ORANG TERDIRI DARI		
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -
Es.II : -	Es.IV : 3	JFU : 8

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

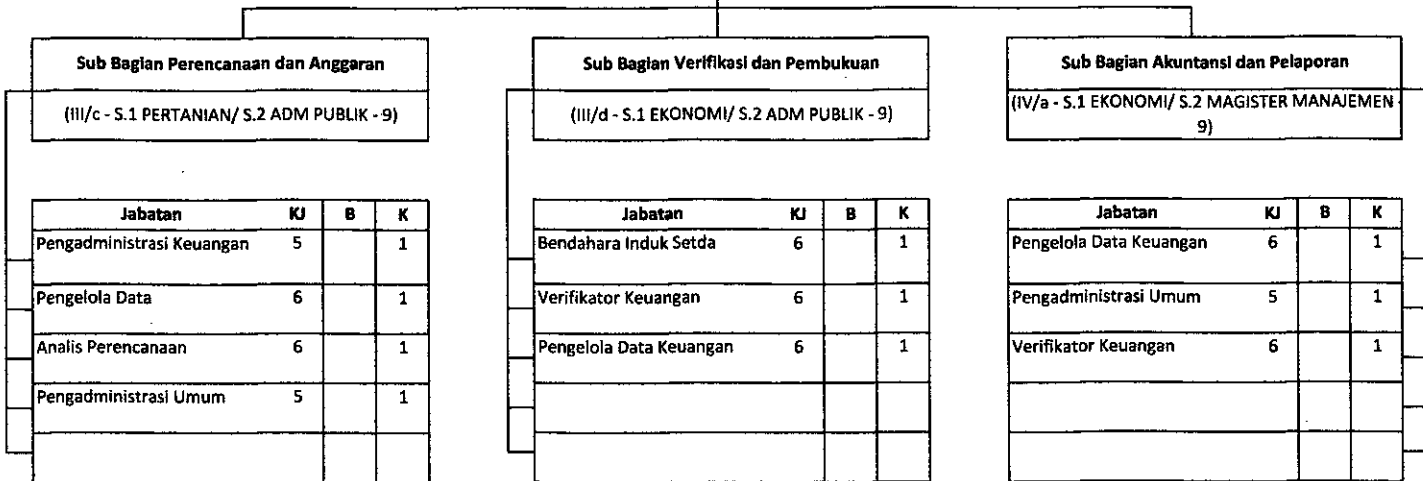
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
(IV/b - S.1 ILMU SOSIAL/ S.2 ADM PUBLIK- 12)

BAGIAN KEUANGAN
(IV/b - S.1 ILMU PEMERINTAHAN/S.2 ADM PUBLIK - 10)

BEBAN KERJA
Melaksanakan dan menatausahakan administrasi keuangan, menyusun RKA dan DPA, melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban bendahara serta membuat laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Keterangan :

- Jumlah JFU/Staf saat ini : 8 orang
- Kebutuhan JFU/Staf berdasar ABK : 10 orang



**PETA JABATAN BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : -	II/d : -	I/d : -
IV/c : -	III/c : 2	II/c : -	I/c : -
IV/b : 1	III/b : 1	II/b : -	I/b : -
IV/a : -	III/a : 1	II/a : -	I/a : -

8 ORANG TERDIRI DARI		
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -
Es.II : 1	Es.IV : 3	JFU : 1

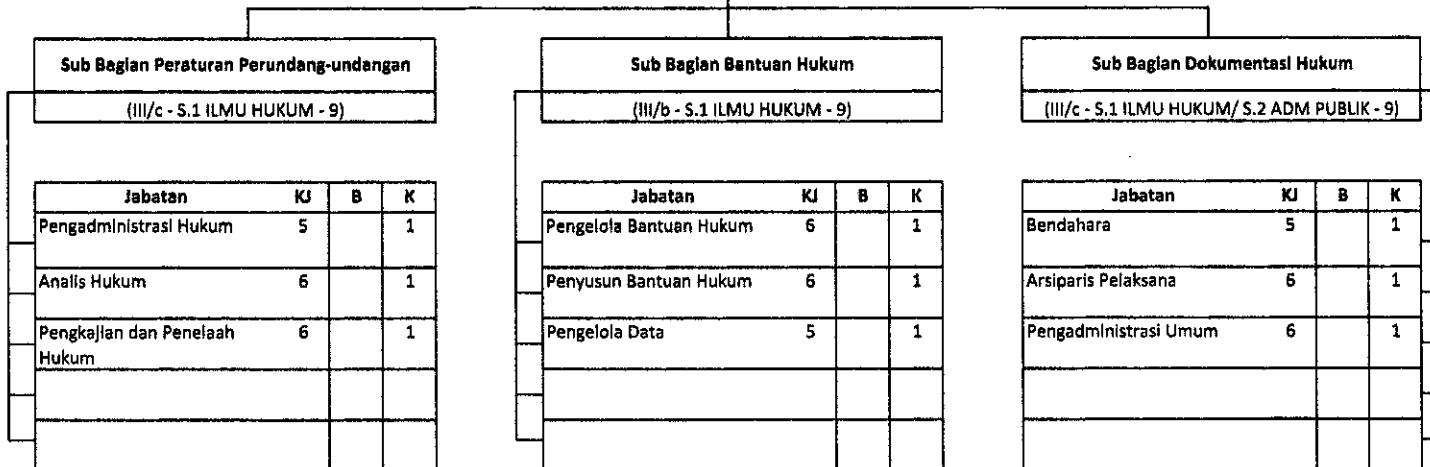
SEKRETARIS DAERAH
(IV/d- S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
(IV/b - S.1 ILMU SOSIAL/ S.2 ADM PUBLIK- 12)

BAGIAN HUKUM
(IV/b - S.1 ILMU HUKUM/ S-2 MAGISTER HUKUM - 10)

BEBAN KERJA
Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, tlaahan, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum.

Keterangan :
- Jumlah JFU/Staf saat ini : 1 orang
- Kebutuhan JFU/Staf berdasar ABK : 9 orang



**PETA JABATAN BAGIAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI				
IV/e : -				
IV/d : -	III/d : 1	II/d : -	I/d : -	
IV/c : -	III/c : 2	II/c : -	I/c : -	
IV/b : 1	III/b : 9	II/b : 2	I/b : -	
IV/a : -	III/a : 1	II/a : -	I/a : -	

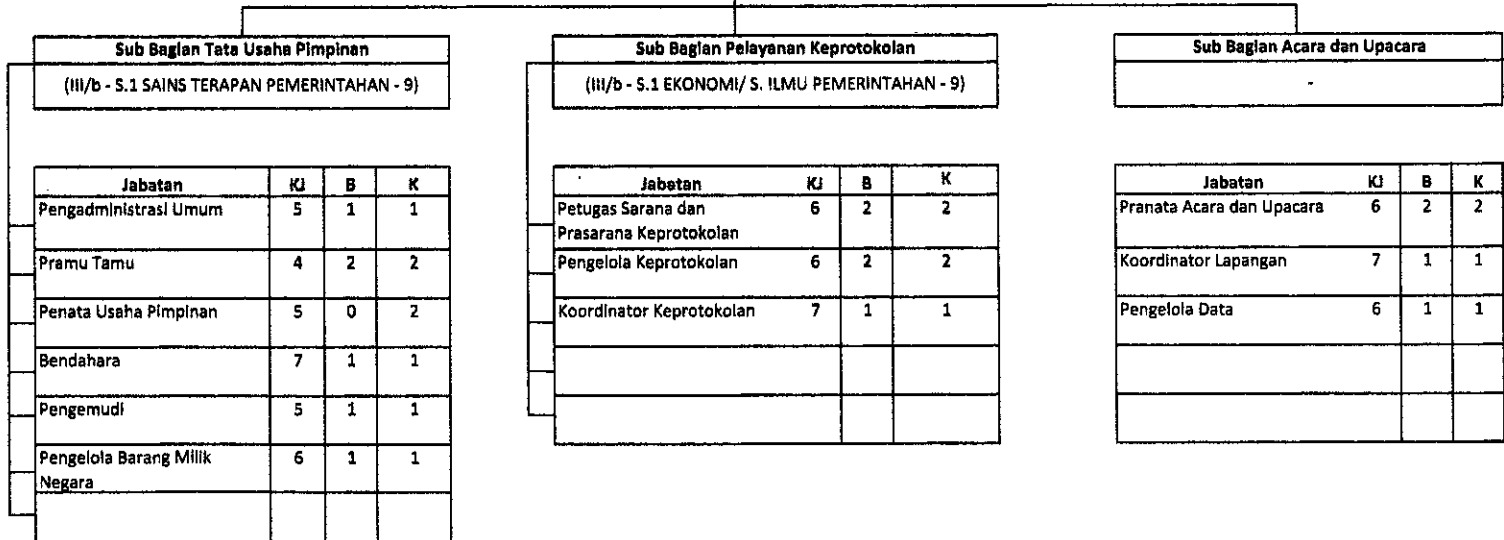
16 ORANG TERDIRI DARI			
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -	
Es.II : -	Es.IV : 2	JFU : 13	

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
(IV/c - S.1 PERTANIAN/S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 12)

BAGIAN PROTOKOL
(III/d - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/ S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 11)

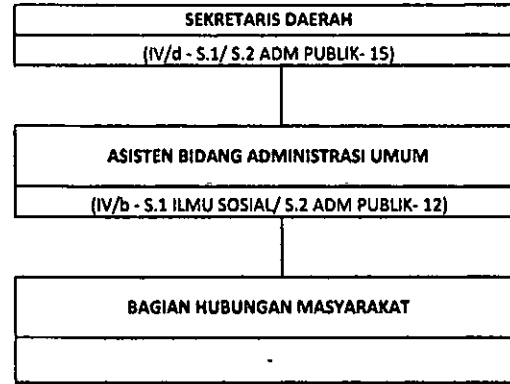
BEBAN KERJA
Urusan keprotokolan terhadap Bupati dan isteri/suami, Wakil Bupati dan isteri/suami, para pejabat yang mewakili atau mendampingi Bupati/Wakil Bupati dan tamu-tamu daerah, agar berjalan dengan baik dan lancar.



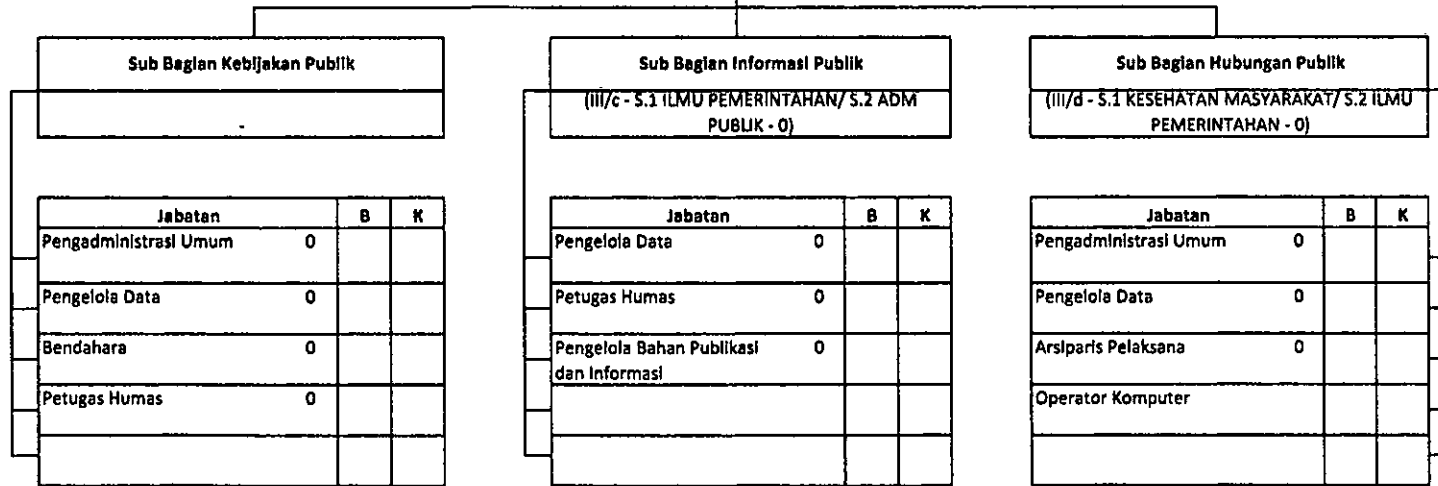
**PETA JABATAN BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : 1	II/d : -	I/d : -
IV/c : -	III/c : 1	II/c : -	I/c : -
IV/b : 1	III/b : 7	II/b : -	I/b : -
IV/a : -	III/a : 2	II/a : -	I/a : -

12 ORANG TERDIRI DARI		
Es.I : -	Es.III : -	JFT : -
Es.II : -	Es.IV : 2	JFU : 10



BEBAN KERJA
Memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan, mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat akurat, proporsional dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat, menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat dan benar kepada masyarakat, memberikan pemahaman kesamaan visi, misi dan persepsi antara masyarakat dan pemerintah kabupaten, menampung aspirasi publik sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah kabupaten.



**PETA JABATAN BAGIAN PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI
SEKRETARIAT DAERAH**

BEBAN KERJA
Menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi d lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang pengelolaan data, sistem informasi dan komunikasi.

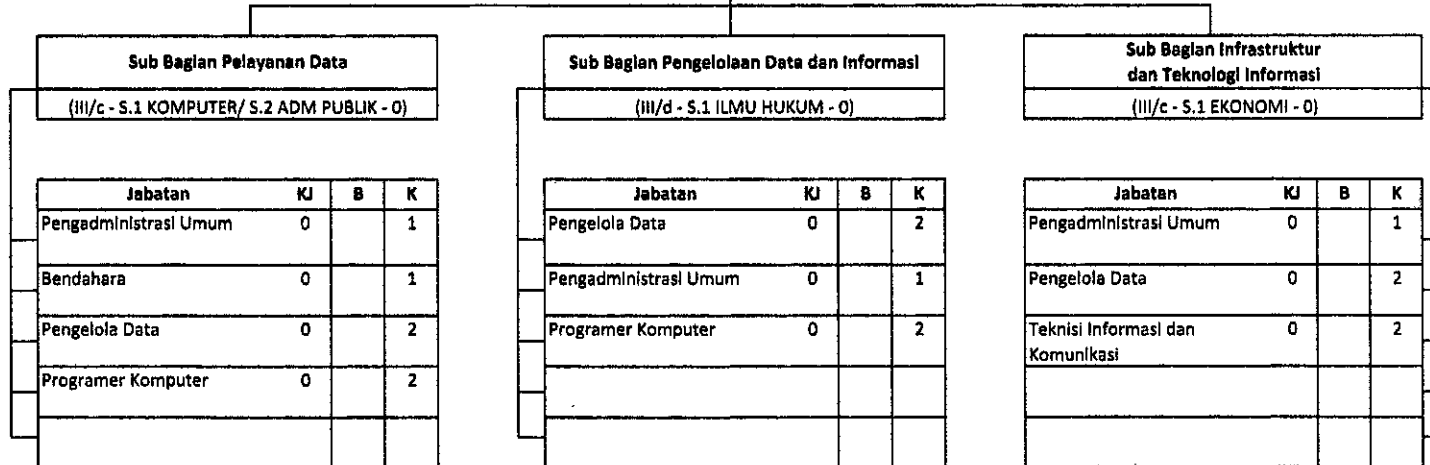
KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : 4	II/d : -	I/d : -
IV/c : -	III/c : 2	II/c : 1	I/c : -
IV/b : -	III/b : 1	II/b : -	I/b : -
IV/a : 1	III/a : 1	II/a : -	I/a : -

10 ORANG TERDIRI DARI			
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -	
Es.II : -	Es.IV : 3	JFU : 6	

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK - 15)

ASISTEN BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
-

BAGIAN PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI
(IV/a- S.1/ S.2 ADM PUBLIK - 0)



**PETA JABATAN BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : 3	II/d : 1	I/d : -
IV/c : -	III/c : 5	II/c : 12	I/c : 3
IV/b : 1	III/b : 16	II/b : 4	I/b : 1
IV/a : 2	III/a : 10	II/a : 13	I/a : 1

71 ORANG TERDIRI DARI			
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -	
Es.II : -	Es.IV : 3	JFU : 68	

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK - 15)

ASISTEN BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
(IV/a - S.1 ILMU HUKUM/ S.2 ADM PUBLIK - 0)

BEBAN KERJA
Melakukan pembinaan ketatausahaan urusan rumah tangga serta melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa serta membina administrasi pengadaan dan material.

Sub Bagian Tata Usaha			
(III/c - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 0)			
Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi Umum	0		2
Bendahara	0		1
Pengemudi	0		10
Pramu Bakti	0		6
Pramu Tamu	0		6
Analisis Kepegawafan	0		1
Caraka	0		2
Pengelola Data	0		2
Pengelola Keuangan	0		2
Verifikator Keuangan	0		2
Arsiparis	0		2

Sub Bagian Analisis Kebutuhan, Perlengkapan dan Aset			
(IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 0)			
Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data	0		1
Pengelola Barang Milik Daerah	0		2
Analisis Perencanaan	0		1
Pemelihara Sarana dan Prasarana	0		1
Koordinator Gudang	0		2
Penata Kendaraan Dinas	0		2
Pemelihara Barang	0		2
Pengelola Kendaraan Dinas	0		2
Pengadministrasi Umum	0		1
Penyimpan Barang	0		1

Sub Bagian Rumah Tangga			
(III/c - S.1 EKONOMI AKUTANSI - 0)			
Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi Umum dan Perlengkapan	0		2
Pengatur Rumah Tangga	0		3
Pemelihara Rumah Tangga	0		3
Pengelola Data	0		2
Pengawas Kebersihan	0		3
Pengelola Wisma	0		2

**PETA JABATAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : 4	II/d : 2	I/d : -
IV/c : -	III/c : 2	II/c : 1	I/c : -
IV/b : -	III/b : 5	II/b : -	I/b : -
IV/a : 2	III/a : 2	II/a : 3	I/a : -

23 ORANG TERDIRI DARI			
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -	
Es.II : -	Es.IV : 3	JFU : 17	

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

ASISTEN BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
-

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN
(IV/a - S.1 ILMU PERTANIAN/ S-2 TEKNOLOGI PASCA PANEN - 0)

BEBAN KERJA
Mengendalikan evaluasi kebijakan, layanan administrasi urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, kopeasi dan UMKM, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi dan tenaga kerja, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, serta LPSE serta pembinaan BUMD.

Sub Bagian Administrasi Pembangunan
(III/d - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 0)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi Umum	0		2
Pengelola Data	0		3
Bendahara	0		1

Sub Bagian Administrasi Perekonomian
(IV/a - S.1 TEKNIK/ S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - 0)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data	0		2
Analisis Perencanaan	0		2
Pengadministrasi Umum	0		2
Analisis Ekonomi	0		2

Sub Bagian Perusahaan, SDA dan Energi
(III/c - S.1 BAHASA INGGRIS - 0)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi Umum	0		2
Operator Komputer	0		1
Pengelola Data	0		2

**PETA JABATAN BAGIAN PENYELESAIAN PERBATASAN
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : 3	II/d : 1	I/d : -
IV/c : -	III/c : 2	II/c : 3	I/c : -
IV/b : 1	III/b : 4	II/b : 1	I/b : -
IV/a : 1	III/a : 3	II/a : -	I/a : -

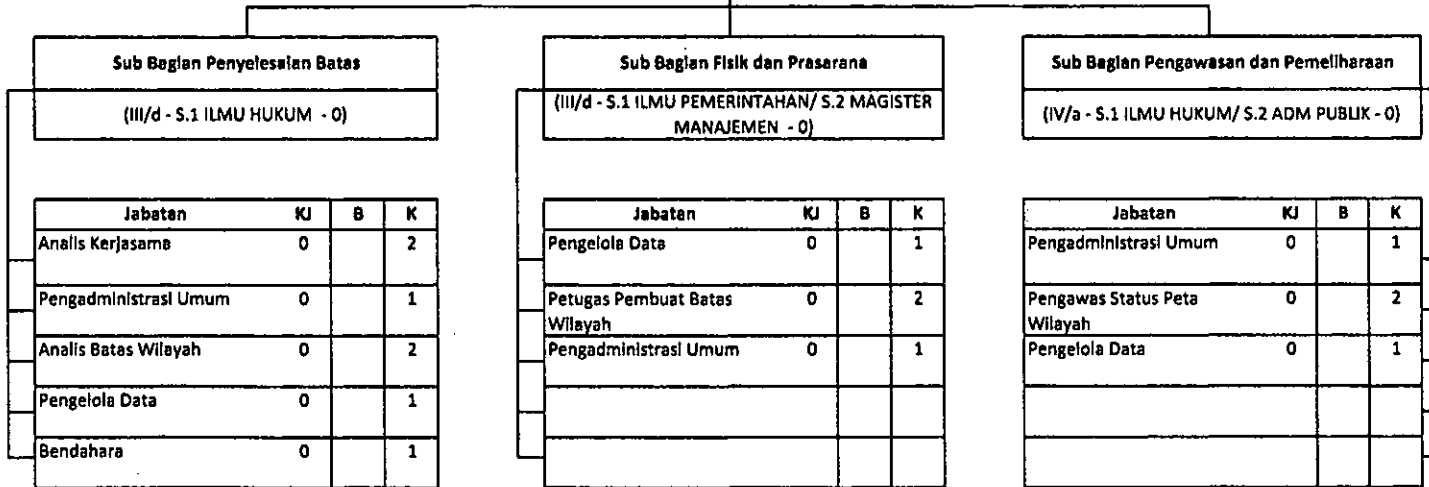
19 ORANG TERDIRI DARI		
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -
Es.II : -	Es.IV : 3	JFU : 15

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK - 15)

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
(IV/c - S.1 PERTANIAN/S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 12)

BAGIAN PENYELESAIAN PERBATASAN
(IV/b - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/ S.2 ADM PUBLIK - 0)

BEBAN KERJA
Menyelenggarakan penyelesaian sengketa perbatasan, pembangunan fisik dan pengadaan prasarana serta pengawasan dan pemeliharaan penegasan perbatasan daerah.



**PETA JABATAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH**

KEKUATAN PEGAWAI			
IV/e : -			
IV/d : -	III/d : -	II/d : -	I/d : -
IV/c : 1	III/c : 3	II/c : 2	I/c : -
IV/b : 1	III/b : 5	II/b : -	I/b : -
IV/a : 2	III/a : 3	II/a : 2	I/a : -

19 ORANG TERDIRI DARI		
Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -
Es.II : -	Es.IV : 3	JFU : 15

SEKRETARIS DAERAH
(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
(IV/c - S.1 PERTANIAN/S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 12)

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
(IV/b - S.1/S.2 ADM PUBLIK - 0)

BEBAN KERJA
Melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat, sosial keagamaan dan sosial budaya.

Sub Bagian Kesejahteraan			
(III/c - S-1 KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM - 0)			
Jabatan	KJ	B	K
Bendahara	0		1
Analisis Kesejahteraan Rakyat	0		2

Sub Bagian Keagamaan			
(IV/a - S.1 PERBANDINGAN AGAMA - 0)			
Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Keagamaan dan Pendidikan	0		2
Pengelola Jemaah Haji	0		3

Sub Bagian Umum			
(IV/a - S.1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/ S.2 ADM PUBLIK - 0)			
Jabatan	KJ	B	K
Operator Komputer	0		2
Penyuluh Bimbingan Mental	0		7

**PETA JABATAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH**

BEBAN KERJA

Melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan bidang forkopinda, pemilihan umum dan penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pengembangan wilayah.

KEKUATAN PEGAWAI

IV/e : -			
IV/d : 1	III/d : 2	II/d : 1	I/d : -
IV/c : 1	III/c : -	II/c : 3	I/c : -
IV/b : 1	III/b : 5	II/b : 1	I/b : -
IV/a : -	III/a : -	II/a : -	I/a : -

15 ORANG TERDIRI DARI

Es.I : -	Es.III : 1	JFT : -
Es.II : 2	Es.IV : 3	JFU : 9

SEKRETARIS DAERAH

(IV/d - S.1/ S.2 ADM PUBLIK- 15)

ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

(IV/c - S.1 PERTANIAN/S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 12)

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

(IV/b - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/S.2 EKONOMI PEMBANGUNAN - 0)

Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum

(III/b - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi Umum	0		2
Pengelola Data	0		2
Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	0		2

Sub Bagian Perangkat Daerah

(III/b - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 0)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi Umum	0		2
Analisis Pengembangan Wilayah	0		2
Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	0		2

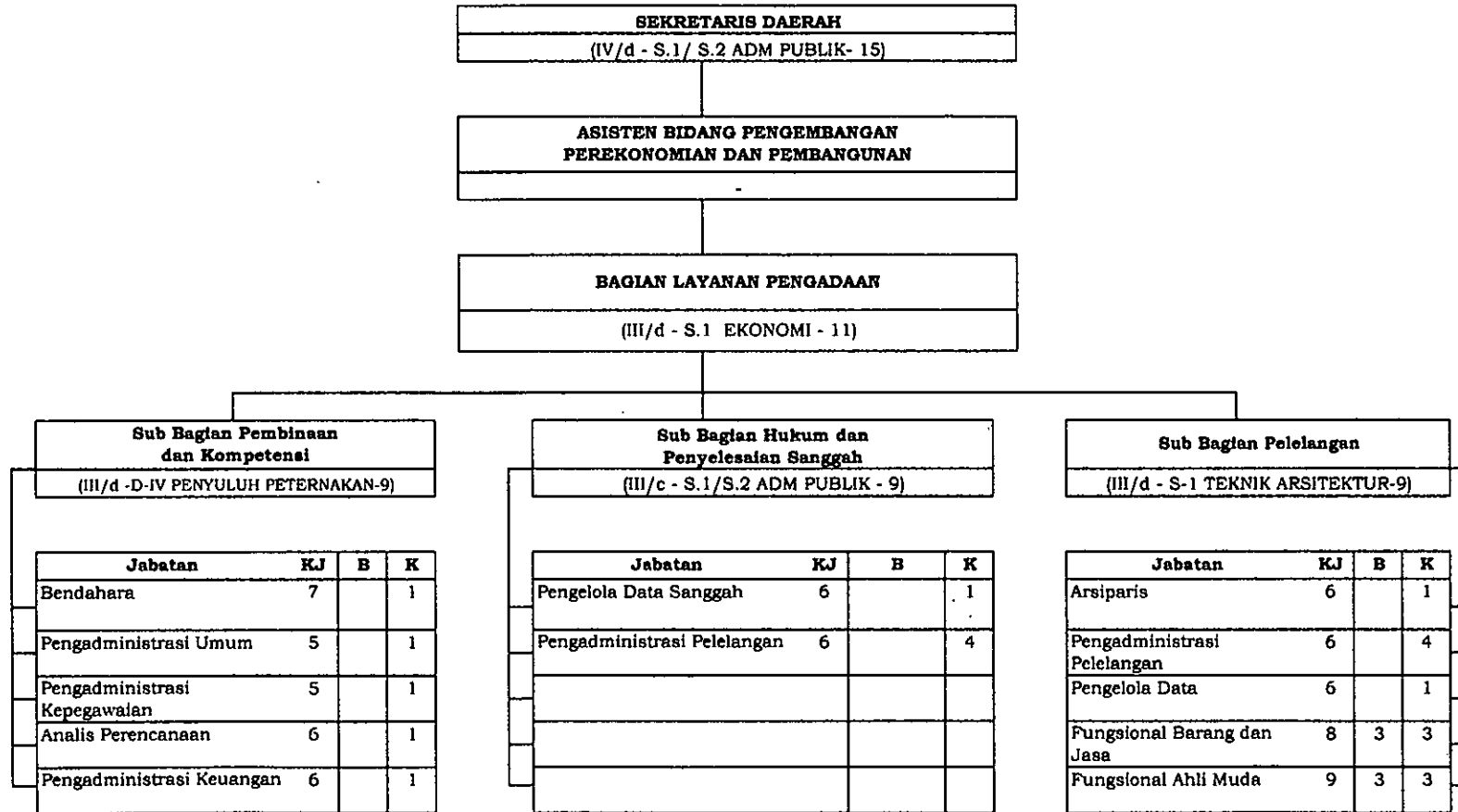
Sub Bagian Pengembangan Wilayah dan Pertanahan

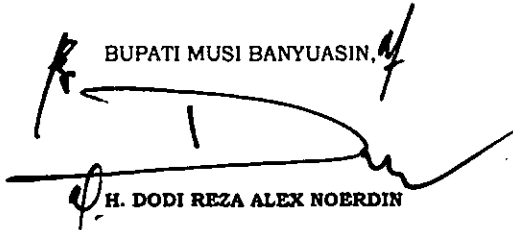
(III/d - S.1 ADM NEGERA - 0)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Pemerintahan Daerah	0		2
Analisis Pengembangan Wilayah	0		2
Pengelola Data	0		2
Bendahara	0		1

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 80 Tahun 2018
 Tanggal : 9 AGUSTUS 2018
 Tentang : Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

**PETA JABATAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
 SEKRETARIAT DAERAH**




 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 80 Tahun 2018
 Tanggal : 9 AGUSTUS 2018
 Tentang : Peta Jabatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

PETA JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

BERAN KERJA
 Melaksanakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

KEKUATAN PEGAWAI

IV/e: -	III/d: 3	II/d: 2	I/d: -
IV/d: -	III/c: 17	II/c: 3	I/c: 1
IV/c: -	III/b: 24	II/b: -	I/b: -
IV/b: 1	III/a: 10	II/a: -	I/a: -
IV/a: 9			

TO ORANG TERDIRI DARI

Es.I : -	Es.III : 5	JFT : -
Es.II : -	Es.IV : 15	JFU : 50

Keterangan :
 - Jumlah JFU/Staff esat tai : 50 orang
 - Kebutuhan JFU/Staff berdasarkan ABK : 53 orang

KEPALA BADAN

SEKRETARIS
 (IV/b - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 11)

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 (IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 8)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis program dan perencanaan	6		1
Pengelola program dan laporan	6		1
Penyusun rencana dan kegiatan	6		1
Analisis laporan akuntabilitas kinerja	6		1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 (IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasian kepegawaian	5		1
Pengadministrasian umum	5		1

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 (III/b - S.1 EKONOMI AKUTANSI - 8)

Jabatan	KJ	D	K
Pengadministrasian keuangan	5		1
Bendahara	7		1
Pengelola barang milik negara	5		1

BIDANG ANGGARAN
 (IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PEMBANGUNAN - 11)

Kepala Sub Bidang Anggaran I
 (III/c - S.1 TEKNIK/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola data penganggaran	6		1
Penyusun Anggaran	7		1
Analisis Informasi Pelaksanaan Anggaran	7		1

BIDANG PERBENDAHARAAN
 (IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 11)

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
 (III/c - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasian Keuangan	5		1
Pengelola Data Keuangan Daerah	7		1
Pengelola Data Sistem Informasi Perbendaharaan	7		1
Analisis Laporan Keuangan	7		2

BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
 (III/d - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/ S.2 EKONOMI PEMBANGUNAN - 1)

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset I
 (III/d - S.1 EKONOMI AKUTANSI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Kebijakan Klasifikasi Barang dan Aset	6		1
Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang dan Aset	7		1

BIDANG AKUTANSI
 (IV/a - S.1 EKONOMI AKUTANSI/ S.2 ADM PUBLIK - 11)

Kepala Sub Akuntansi Penerimaan
 (III/c - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6		1
Analisis Laporan Keuangan	7		1
Pengelola akuntansi	6		1

Kepala Sub Bagian Anggaran II
(III/c - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Penganggaran	6		1
Penyusun Anggaran	7		1
Analisis Informasi Pelaksanaan Anggaran	7		1

Kepala Sub Bagian Anggaran III
(III/c - S.1 TEKNIK/ S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Penganggaran	6		1
Penyusun Anggaran	7		1
Analisis Informasi Pelaksanaan Anggaran	7		1
Bendahara Pembantu	7		1

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
(III/d - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasian Keuangan	5		1
Pengelola Data Keuangan Daerah	7		1
Pengelola Data Sistem Informasi Perbendaharaan	7		1
Analisis Laporan Keuangan	7		2

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III
(III/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasian Keuangan	5		1
Pengelola Data Sistem Keuangan Daerah	7		1
Pengelola Data Sistem Informasi Perbendaharaan	7		1
Analisis Laporan Keuangan	7		2
Bendahara Pembantu	7		1

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset II
(III/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Penasixir Aset Daerah	6		1
Pengelola Data Kebijakan Klasifikasi Barang dan Aset	6		1
Pengelola Data Distribusi dan Penghapusan Barang	6		1

Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset III
(III/c - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Distribusi dan Penghapusan Barang	6		1
Pengadministrasian Barang	6		1
Bendahara Pembantu	7		1

Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran
(IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Laporan Keuangan	7		1
Pengelola Data Sistem Akuntansi	6		1
Pengelola Akuntansi	6		1

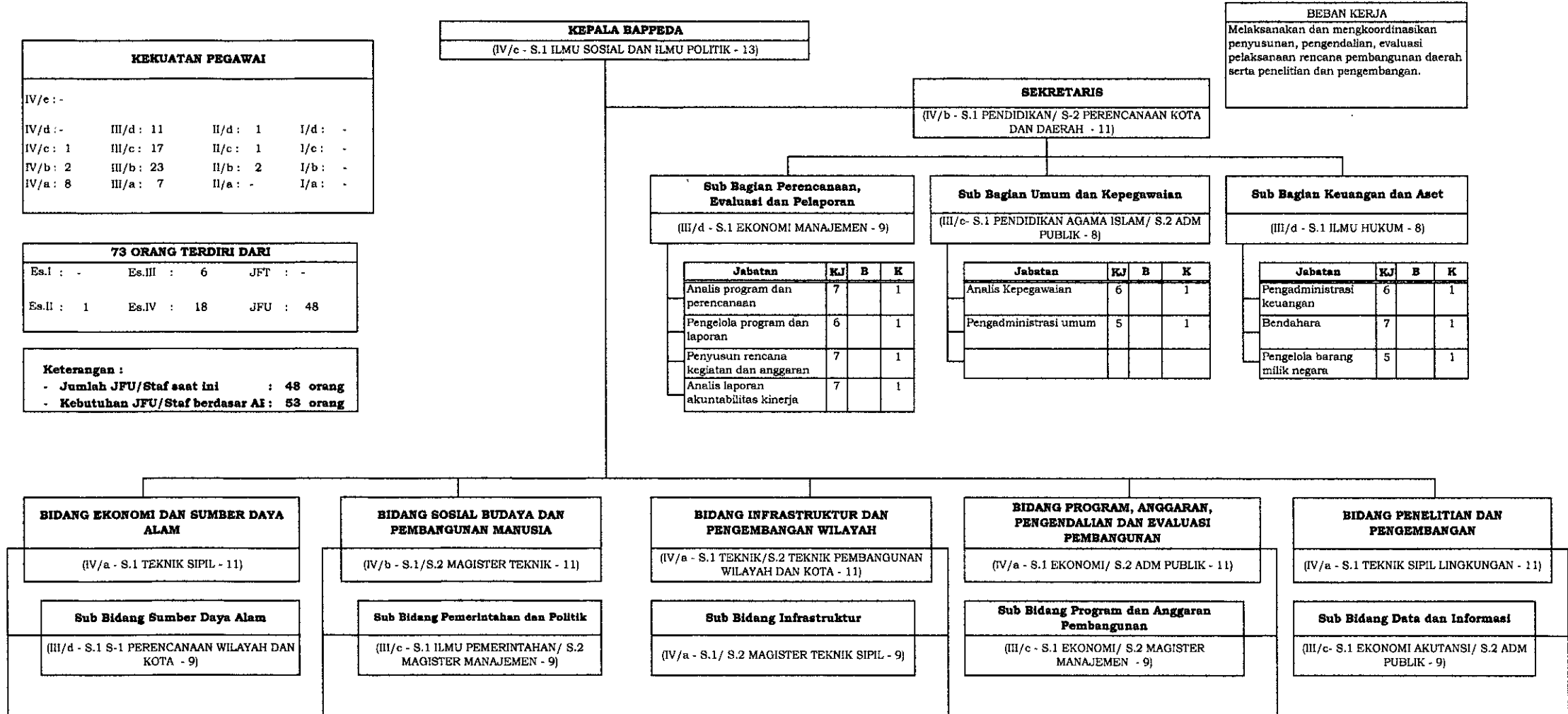
Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggung Jawaban
(III/c - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Keuangan	7		1
Pengelola Data Belajar dan Laporan Keuangan	6		1
Pengelola Akuntansi	6		1
Pengelola Data Laporan Kas	6		1

BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 80 Tahun 2018
 Tanggal : 9 AGUSTUS 2018
 Tentang : Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

PETA JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	6		1
Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7		1
Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	7		1

Sub Bidang Ekonomi

(IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Ekonomi	6		1
Analisis Perencanaan dan Program	7		1
Pengelola Program dan Kegiatan	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

Sub Bidang Kerjasama Pembangunan

(IV/a - S.1 PENDIDIKAN/ S.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Penyusun Bahan Pelaporan	6		1
Analisis Kemitraan	6		1
Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	7		1

Sub Bidang Kessos dan Kesra

(III/d - S.1/ S.2 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH- 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data Bahan Evaluasi dan Pelaporan	6		1
Pengelola Program dan Kegiatan	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

(III/c - S.1 EKONOMI/ S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Perencanaan dan Program	7		1
Pengelola Program dan Kegiatan	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

Sub Bidang Pengembangan Wilayah

(III/d - S.1 ILMU HUKUM- 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Pengembangan Wilayah	6		1
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6		1
Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	6		1

Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup

(III/c - S.1 S.1 TEKNIK ARSITEKTUR - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan Anggaran	6		1
Pengelola data Pengendalian Pembangunan	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

Sub Bidang Pengendalian Pembangunan

(III/d - S.1 TEKNIK/ S.2 MAGISTER MANAJEMEN - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengolah data Pengendalian Pembangunan	6		1
Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6		1
Analisis Pembangunan	6		1

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan

(III/d - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Program dan Kegiatan	6		1
Pengelola Data dan Informasi	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

SUB BIDANG PENGKAJIAN Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Budaya

(III/c- S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Hasil Penelitian	7		1
Pengelola Pemanfaatan Hasil Penelitian	6		1

Sub Bidang Pengkajian SDA, Perhubungan, Teknologi dan Inovasi

(IV/a - S.1 TEKNIK/ S.2 MAGISTER TEKNIK SIPIL - 9)

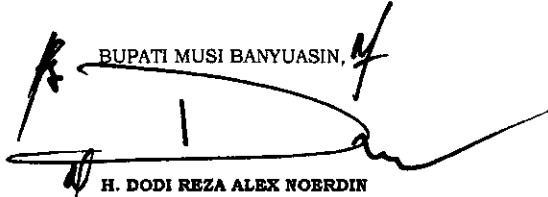
Jabatan	KJ	B	K
Analisis Pembangunan	6		1
Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	6		1

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Kemitraan	6		1
Pengadministrasi Pendidikan dan Kebudayaan	5		1

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Perencanaan Pemukiman dan Lingkungan	7		1
Pengelola Data Pengendalian Pembangunan	6		1
Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	6		1

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola rencana dan Evaluasi Program	6		1
Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	7		1
Pengumpul Bahan Perencanaan	6		1

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Pemanfaatan hasil Penelitian	6		1
Pengelola Program dan Kegiatan	6		1
Analisis Hasil Penelitian	7		1



 BUPATI MUSI BANYUASIN,

 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran IV : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 80 Tahun 2018
 Tanggal : 9 Agustus 2018
 Tentang : Peta Jabatan Badan Kepegawaian Pengembangan Dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

PETA JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BEBAN KERJA
 Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM.

KERUATAN PEGAWAI

IV/c : -	III/d : 11	II/d : -	I/d : -
IV/d : -	III/c : 4	II/c : 1	I/c : -
IV/e : 1	III/b : 14	II/b : -	I/b : -
IV/b : -	III/a : 8	II/a : 2	I/a : -

KEPALA BADAN
 (IV/c - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/ S.2 MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN - 13)

SEKRETARIS
 (IV/a - S.1 ADMINISTRASI NEGARA - 11)

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 (II/c - S.1 EKONOMI - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis program dan perencanaan	6	1	1
Pengelola program dan laporan	6	0	1
Penyusun rencana kegiatan dan anggaran	6	0	1
Analisis laporan akuntabilitas kinerja	6	0	1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 (III/b - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi kepegawaian	5	1	1
Pengadministrasi umum	5	1	1

Sub Bagian Keuangan dan Aset
 (III/d - S.1 EKONOMI/ S.2 MAGISTER MANAJEMEN- 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi keuangan	5	1	1
Bendahara Induk	7	1	1
Pengelola barang milik negara	5	1	1

39 ORANG TERDIRI DARI

Ea.I : -	Ea.III : 4	JFT : -
Ea.II : 1	Ea.IV : 14	JFU : 24

Keterangan :
 - Jumlah JFU/ Staf saat ini : 24 orang
 - Kebutuhan JFU/ Staf berdasar ASK : 50 orang

BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI

Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
 (III/b - S.1 ILMU HUKUM - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	1	1
Pengelola Disiplin Pegawai	6	0	1
Pengadministrasi ASN Non PNS	6	0	1
Analisis Kepegawaian	6	0	1

BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
 (II/d - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 11)

Sub Bidang Mutasi
 (III/c - S.1 ILMU HUKUM - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Kepegawaian	6	1	1
Penyusun Rencana Mutasi	6	0	1
Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	6	0	1

BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
 (IV/a - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 11)

Sub Bidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi
 (III/d - S.1 ILMU PEMERINTAHAN/ S.2 ADM PUBLIK - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Program Diklat	6	1	1
Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	1	1
Pengadministrasi Tugas Belajar	5	1	1

BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
 (II/d - S.1 ILMU HUKUM - 11)

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
 (III/b - S.1 ILMU HUKUM - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	0	1
Pengadministrasi Umum	6	1	1
Analisis Kinerja	6	0	1

Sub Bidang Data dan Informasi				
d - S.1 EKONOMI MANAJEMEN/S.2 ADM PUBLIK				
Jabatan	KJ	B	K	
Pengelola Teknologi Informasi Komputer	6	0	1	
Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	6	0	1	
Pengelola Situs/Web	6	0	1	
Arsiparis	6	1	1	

Sub Bidang Fasilitas Profesi ASN				
(II/b - S.1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - 9)				
Jabatan	KJ	B	K	
Pengadministrasi Umum	6	1	1	
Pengelola Profesi SDM	6	0	1	
Bendahara Pembantu	6	1	1	

Sub Bidang Kepegangatan				
/b - S.1 EKONOMI MANAJEMEN/S.2 ADM PUBLIK				
Jabatan	KJ	B	K	
Pengadministrasi SK Kenalkaan Pangkat	6	1	2	
Annalis Kepegawaian	6	1	1	
Bendahara Pembantu	6	0	1	

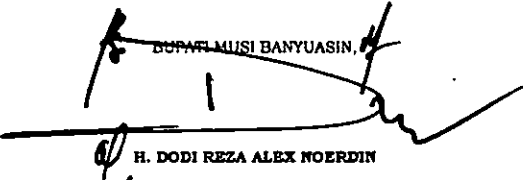
Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi				
Jabatan	KJ	B	K	
Annalis Pengembangan Karir	7	0	1	
Pengelola Mutasi dan Promosi	6	1	1	

Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional				
(III/b - S.1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN - 9)				
Jabatan	KJ	B	K	
Annalis Program Diklat	6	0	1	
Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	1	1	
Penyusun Laporan Hasil Diklat	6	1	1	

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi				
(III/d - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 9)				
Jabatan	KJ	B	K	
Pengadministrasi Umum	6	0	1	
Annalis Pengembangan Kompetensi	7	0	1	
Pengelola Pelaksanaan Seleksi Jabatan	6	1	1	
Bendahara Pembantu	6	1	1	

Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II				
(III/d - S.1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH - 9)				
Jabatan	KJ	B	K	
Pengelola Penilaian Kinerja	6	0	1	
Pengadministrasi Umum	6	0	1	
Annalis Kinerja	6	0	1	

Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan				
(III/d - S-1 PSIKOLOGI- 9)				
Jabatan	KJ	B	K	
Pengadministrasi Umum	6	0	1	
Pengelola Disiplin Pegawai	6	1	1	
Annalis Kepegawaian	6	0	1	
Annalis Penegakan Integritas dan Disiplin	6	0	1	


 BUPATI MUSI BANYUASIN,
 H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Lampiran V : Peraturan Bupati Musi Banyuasin
 Nomor : 80 Tahun 2018
 Tanggal : 9 Agustus 2018
 Tentang : Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kabupaten Musi Banyuasin

PETA JABATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMTSP)

BEBAN KERJA
 Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

KEPALA DINAS
 (gol ruang - pend. - kelas jabatan)

KEKUATAN PEGAWAI

IV/e : -	III/d : 13	II/d : 1	I/d : -
IV/c : -	III/c : 5	II/c : 2	I/c : -
IV/b : 3	III/b : 14	II/b : 3	I/b : -
IV/a : 1	III/a : 4	II/a : -	I/a : -

45 ORANG TERDIRI DARI

Ea.I : -	Ea.III : 5	JFT : -
Ea.II : -	Ea.IV : 13	JFU : 28

Keterangan :
 - Jumlah JFU/Staf saat ini : 28 orang
 - Kebutuhan JFU/Staf berdasar ABK : 52 orang

SEKRETARIS
 (IV/b - S.1 ILMU SOSIAL/ S.2 ADM PUBLIK - 11)

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 (III/d - S.1 TEKNIK SIPIL - 9)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis program dan perencanaan	6		1
Pengelola program dan laporan	6		1
Penyusun rencana kegiatan dan anggaran	6		1
Analisis laporan akuntabilitas kinerja	6		1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 (III/c - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN/ S.2 ADM PUBLIK - 8)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi kepegawaian	5		1
Pengadministrasi umum	5		1

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 (III/d - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 8)

Jabatan	KJ	B	K
Pengadministrasi keuangan	7		1
Bendahara	5		1
Pengelola barang milik negara	7		1

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
 (III/d - S.1 SAINS TERAPAN PEMERINTAHAN - 11)

Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 (III/d - S.1 PERTANIAN AGRIBISNIS - 11)

Jabatan	KJ	B	K
Analisis Penanaman Modal	7		1
Pengadministrasi Akoes Penanaman Modal	5		1
Analisis Perizinan	7		1
Bendahara Pembantu	6		1

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL
 (IV/b - S.1 TEKNIK SIPIL - 11)

Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 (III/d - S.1 EKONOMI/ S.2 ADM PUBLIK - 11)

Jabatan	KJ	B	K
Pengawas Penanaman Modal	6		1
Pengelola Perizinan	6		1
Pengelola Data Investasi	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
 (III/d - S.1 KEHUTANAN/ S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - 11)

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkungan
 (III/c - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 11)

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Perizinan	6		1
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan	6		1
Analisis Perizinan	7		1
Juru Gambar	6		1

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
 (IV/b - S.1 ILMU HUKUM/ S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA - 11)

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 /d - S.1 ILMU PEMERINTAHAN/ S.2 ADM PUBLIK -

Jabatan	KJ	B	K
Pengelola Data	6		1
Analisis Data dan Informasi	7		1
Analisis Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal

(gol ruang - pend. - kelas jabatan)

Jabatan	KLJ	B	K
Analisis Iklim Usaha dan Kerjasama	7		1
Pengelola bahan Perencanaan	6		1
Pengelola Data Pengembangan Investasi	6		1

Seksi Promosi Penanaman Modal

(gol ruang - pend. - kelas jabatan)

Jabatan	KLJ	B	K
Analisis Pengembangan Pasar Modal	7		1
Penyempit Bahan Pembinaan dan Promosi	6		1
Pengelola Data Informasi, Publikasi dan Penyuluhan	6		1

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

(III/d - SMA - 11)

Jabatan	KLJ	B	K
Pengelola Pembinaan dan Penanaman Modal	6		1
Analisis Perizinan	7		1
Pengelola Dokumen Perizinan	6		1

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal

(III/d - S.1 ADM NEGARA - 11)

Jabatan	KLJ	B	K
Pengumpul dan Pengelola Data Investasi	6		1
Analisis Usaha dan Kerjasama	7		1
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan	6		1

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan

(III/c - S.1 EKONOMI MANAJEMEN - 10)

Jabatan	KLJ	B	K
Pengelola Perizinan	6		1
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan	6		1
Analisis Perizinan	7		1
Juru Gambar	6		1

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kesejahteraan Rakyat

(III/d - S.1 KOMPUTER/ S.2 ADM PUBLIK - 11)

Jabatan	KLJ	B	K
Pengelola Perizinan	6		1
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan	6		1
Analisis Perizinan	7		1
Juru Gambar	6		1
Bendahara Pembantu	6		1

Seksi Kebijakan dan Penyuluh Layanan

(III/d - S.1 TEKNIK ELEKTRO - 10)

Jabatan	KLJ	B	K
Pengolah Data Informasi, Publikasi dan Penyuluhan	6		1
Analisis Pengusahaan dan Pelayanan	7		1
Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan	6		1

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

d - S.1 EKONOMI/ S.2 MAGISTER ILMU EKONOMI -

Jabatan	KLJ	B	K
Pengelola Program dan Pelaporan	6		1
Pengelola Data	6		1
Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan	6		1

BUPATI MUSI BANYUASIN.

H. DODI REZA ALEX NOERDIN